



JURNAL PENDIDIKAN GEOGRAFI UNPATTI

Volume 2 Nomor 2 Agustus 2023 (151-162)

E-ISSN 2988-0203 P-ISSN 3025-4930

DOI: <https://doi.org/10.30598/jpguvol2iss2pp151-162>

Kajian Pemukiman Kumuh di Jalan Sultan Hasanuddin Rt 002/Rw 010 Desa Batu Merah Bawah Kota Ambon

Study of Slums on Jalan Sultan Hasanuddin Rt 002/Rw 010, Batu Merah Bawah Village, Ambon City

Damiana Toatubun¹, Mohammad Amin Lasaiba^{1*}, Daniel Anthoni Sihasale¹

Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan IPS FKIP Universitas Pattimura

Article Info	ABSTRAK
Kata Kunci: Pemukiman Kumuh, Kota	Pemukiman kumuh ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan perumahan yang tidak layak huni. Kepemilikan rumah menjadi faktor penting yang memengaruhi pemukiman kumuh. Penelitian ini berfokus pada pemukiman kumuh di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Batu Merah Bawah, Kota Ambon. Penelitian ini mengedepankan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam karakteristik pemukiman kumuh, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat yang diselidiki menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, dengan mayoritas kepala keluarga memiliki pendapatan bulanan rendah, menunjukkan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan. Meskipun sebagian besar responden menganggap pendapatan mereka mencukupi, 20% masih menghadapi kesulitan ekonomi. Selain itu, perhatian juga tertuju pada kondisi perumahan dan infrastruktur dasar yang memerlukan perbaikan mendesak, seperti jalan yang primitif dan fasilitas sanitasi yang terbatas. Variasi dalam struktur keluarga, kepemilikan rumah, dan akses ke sumber air bersih menyoroti perlunya kebijakan yang inklusif untuk layanan dasar seperti sanitasi, listrik, dan air bersih. Temuan ini menjadi dasar untuk langkah-langkah perbaikan dalam pembangunan ekonomi, perumahan, dan infrastruktur, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Keywords: Slum Settlements, Urban	ABSTRACT <i>Slums are characterized by high population density and inadequate housing. Homeownership is a crucial factor influencing slum settlements. This research focuses on slum settlements on Sultan Hasanuddin Street, Batu Merah Bawah Village, Ambon City. It employs a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the characteristics of the slum settlement and relevant social and economic factors. The research findings reveal that the surveyed community faces social and economic challenges, with most households having low monthly incomes, indicating income inequality. While most respondents consider their income sufficient, 20% still struggle economically. Additionally, attention is drawn to the urgent need for housing and basic infrastructure improvements, such as primitive roads and limited sanitation facilities. Diversity in family structures, homeownership, and access to clean water highlight the necessity of inclusive policies for essential services like sanitation, electricity, and clean water. These findings serve as a foundation for better economic development, housing, and infrastructure initiatives to enhance overall quality of life and community welfare.</i>

***Corresponding Author:**

Mohammad Amin Lasaiba

Afiliasi: Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan IPS FKIP Universitas Pattimurai Ambon

PENDAHULUAN

Perkembangan kota merupakan fenomena sosial yang menarik dan sangat berhubungan dengan lokasi geografis yang strategis (Surya & Taibe, 2022). Pada awalnya, banyak kota bermula sebagai permukiman kecil yang terletak di tempat-tempat dengan lokasi yang menguntungkan untuk kegiatan perdagangan (Permatasar et al., 2022). Lokasi yang strategis ini seringkali dekat dengan sumber daya alam, jalur transportasi, atau pelabuhan alami, yang membuatnya menjadi pusat aktivitas ekonomi (Kusumawardhana, 2023). Seiring berjalannya waktu, perkembangan kota adalah proses perubahan yang mencirikan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, padatnya struktur bangunan yang semakin rapat, dan perluasan wilayah yang terbangun, terutama dalam hal pemukiman. Dalam proses ini, fasilitas kota juga semakin lengkap, mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang memadukan beragam kepentingan penduduknya.

Namun, perkembangan kota juga menghadirkan sejumlah tantangan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mengakibatkan peningkatan permintaan akan fasilitas dan layanan kota, seperti perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan (Karina et al., 2014). Oleh karena itu, perencanaan perkembangan kota yang berkelanjutan dan berbasis pada pemahaman akan geografi dan lokasi yang strategis menjadi sangat penting. Selain itu, upaya untuk mempertahankan kualitas lingkungan, mengelola mobilitas penduduk, dan memastikan akses ke sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari perkembangan kota yang sukses (Juwono et al., 2022). Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat merencanakan dan mengelola perkembangan kota dengan lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan memastikan kota tetap berfungsi sebagai pusat

aktivitas ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Auliannisa, 2009).

Perkembangan suatu kota dapat diukur melalui sejumlah indikator yang mencakup kondisi bangunan, infrastruktur, lalu lintas, dan tingkat kepadatan penduduk (S. M. Putra et al., 2022). Kondisi bangunan dan fasilitas perkotaan yang baik dan memadai, termasuk permukiman yang layak, sarana pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan, dan pusat-pusat perkantoran, merupakan indikasi penting dari perkembangan yang positif (I. M. Putra et al., 2023). Di samping itu, lalu lintas yang padat juga dapat mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi dalam kota tersebut. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, baik oleh penduduk asli maupun pendatang, seringkali menjadi karakteristik perkembangan kota-kota di Indonesia. Fenomena urbanisasi yang terus berlangsung mengakibatkan kota-kota menjadi pusat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, sehingga menerima sejumlah besar pendatang yang mencari peluang di kota tersebut (Muryanti, 2022). Oleh karena itu, pemahaman akan karakteristik perkembangan kota ini menjadi kunci dalam merencanakan tata ruang perkotaan yang berkelanjutan dan menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah (Prasetyo, 2009).

Peningkatan pertumbuhan penduduk di suatu daerah seringkali berdampak pada peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal, dan jika tidak dielola dengan baik, dapat mengakibatkan pemukiman kumuh (Kiswoyo et al., 2023). Fenomena ini terutama terlihat dalam kota-kota besar di Indonesia, di mana urbanisasi dan migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan terus berlangsung (Wagistina et al., 2023). Keadaan ini memberikan tekanan pada lahan dan infrastruktur perkotaan, yang sering tidak mampu mengakomodasi lonjakan populasi dengan cukup baik. Pemukiman

kumuh menjadi masalah signifikan dalam banyak kota besar di Indonesia, yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup penduduk dan lingkungan sekitar.

Pemukiman kumuh bukan lagi menjadi isu eksklusif bagi kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga menyebar ke kota-kota yang lebih kecil seperti Ambon, yang terletak di wilayah timur Indonesia. Salah satu contohnya adalah permasalahan pemukiman kumuh yang terjadi di jalan Sultan Hasanuddin, Desa Batu Merah Bawah. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan terkait pemukiman kumuh tidak hanya terbatas pada daerah metropolitan besar, tetapi juga menjadi masalah yang relevan di kota-kota kecil atau menengah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang akar permasalahan dan karakteristik khusus dari pemukiman kumuh di kota-kota seperti Ambon sangat penting. Penelitian yang memahami konteks lokal ini dapat membantu merancang solusi yang sesuai dan efektif, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik pemukiman, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan. Melalui pemahaman yang mendalam ini, kita dapat bekerja menuju perkembangan kota yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik untuk semua warganya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu jenis, desain, atau rancangan penelitian yang umumnya digunakan untuk mengkaji objek penelitian alami atau dalam kondisi nyata, dan tidak diatur seperti dalam eksperimen (Leuwol et al., 2023). Penelitian ini yang mengambil pendekatan kualitatif sangat relevan untuk menggali informasi yang mendalam tentang pemukiman kumuh di Jalan Sultan Hasanuddin, Batu Merah Bawah, Kota Ambon. Dalam pendekatan ini, peneliti akan memiliki kesempatan untuk meresapi

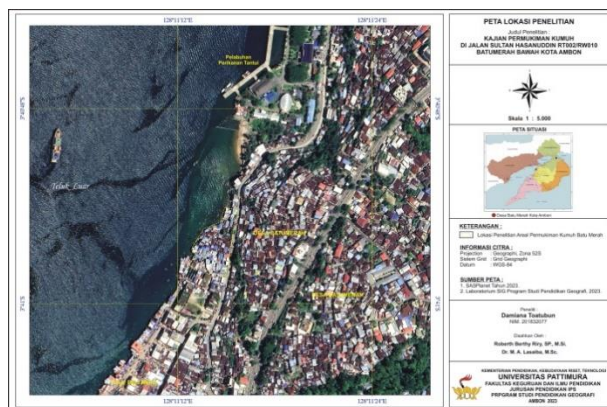
pengalaman, pemikiran, dan perasaan penduduk yang tinggal di pemukiman tersebut. Kualitatif memungkinkan peneliti untuk melampaui sekadar angka dan statistik, dan lebih mendalam dalam memahami bagaimana pemukiman kumuh ini memengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya.

Pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dimensi sosial, kultural, dan emosional yang sering kali terabaikan dalam pendekatan kuantitatif. Melalui metode ini, peneliti dapat lebih mendalam dalam memahami dinamika sosial di antara penduduk pemukiman kumuh, seperti hubungan antar tetangga, solidaritas komunitas, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap persepsi subyektif penduduk mengenai kualitas lingkungan tempat tinggal mereka, termasuk masalah sanitasi, akses air bersih, serta infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum.

Lebih jauh, pendekatan kualitatif membuka peluang untuk memahami tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh penduduk, misalnya dalam memperoleh penghidupan, menjaga kesehatan, atau memastikan pendidikan anak-anak mereka di tengah keterbatasan. Selain itu, penelitian ini dapat mengungkap harapan dan aspirasi penduduk untuk masa depan, seperti keinginan mereka untuk perbaikan fasilitas, peningkatan akses terhadap layanan publik, dan keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pemukiman yang lebih baik. Dengan demikian, data yang dihasilkan dari pendekatan kualitatif ini tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang realitas kehidupan di pemukiman kumuh, tetapi juga memberikan landasan yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal masyarakat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum

Secara geografis, Kecamatan Sirimau memiliki posisi yang strategis di Kota Ambon, dengan batasan yang beragam. Batas utaranya berupa Teluk Ambon, yang memberikan akses ke laut dan potensi sumber daya laut. Sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Hatalai dan Desa Ema di Kecamatan Leitimur Selatan, menunjukkan hubungan antara dua kecamatan yang berdekatan. Di sebelah timur, Kecamatan Sirimau berbatasan dengan Desa Halong di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, sementara sebelah baratnya berbatasan dengan Kelurahan Urimessing dan Kelurahan Silale di Kecamatan Nusaniwe.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Ibu kota kecamatan, Sirimau, terletak di pusat Kota Ambon, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di kota tersebut. Kecamatan ini memiliki luas yang cukup besar, mencapai 86,81 km persegi, yang dibagi menjadi 4 desa dan 10 kelurahan. Dengan demikian, Kecamatan Sirimau memiliki beragam karakteristik geografis dan sosial di dalamnya. Faktor ini mungkin berdampak pada kondisi pemukiman kumuh, seperti yang ingin diteliti berdasarkan kawasan, yaitu sempadan Kali Desa Batu Merah. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat lebih memahami bagaimana geografi dan batasan wilayah memengaruhi kondisi pemukiman kumuh di sepanjang sempadan Kali Desa Batu Merah, serta bagaimana hal ini

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari penduduk setempat.

Kondisi Pemukiman Kumuh Masyarakat

Kondisi masyarakat adalah gambaran holistik dari berbagai aspek yang membentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya suatu kelompok manusia. Ini mencakup faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, struktur keluarga, kepemilikan rumah, infrastruktur, dan banyak lagi. Kondisi masyarakat dapat sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain,

Penghasilan kepala keluarga tiap bulan adalah indikator penting yang mencerminkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Hal ini merujuk pada jumlah pendapatan yang diterima oleh kepala keluarga dalam periode satu bulan, yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti gaji, usaha, atau bantuan sosial. Penghasilan Kepala Keluarga terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Observasi Tentang Penghasilan Kepala Keluarga Tiap Bulan

No	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	1.000.000	1	10%
2	1.500.000	1	10%
3	500.000	3	30%
4	200.000	5	50%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa mayoritas kepala keluarga dalam masyarakat tersebut memiliki penghasilan bulanan rendah, dengan setengah dari responden (50%) mendapatkan penghasilan sekitar Rp 200.000 per bulan. Hanya sedikit yang memiliki penghasilan lebih tinggi, dengan 20% responden memiliki penghasilan di atas Rp 1.000.000. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksetaraan dalam pendapatan di masyarakat tersebut, yang mungkin memiliki

dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.

Pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari adalah aspek penting dalam kehidupan sekeluarga yang mencakup berbagai keperluan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Sehari-Hari terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Observasi Berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Sehari-Hari

No	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Mencukupi	8	80%
2	Tidak mencukupi	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (80%) menyatakan bahwa pendapatan mereka mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Namun, ada 20% responden lainnya yang mengindikasikan bahwa pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Hasil ini mencerminkan variasi dalam tingkat kesejahteraan dan kestabilan finansial di dalam masyarakat tersebut, yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan akses mereka terhadap berbagai layanan dan barang kebutuhan.

Jumlah anggota keluarga dalam satu rumah merupakan indikator penting yang mempengaruhi dinamika dan struktur sosial rumah tangga. Hal ini mencakup berapa banyak individu yang tinggal di satu tempat tinggal, serta bagaimana hubungan antar anggota keluarga tersebut berjalan, termasuk tanggung jawab sosial, distribusi tugas, dan dukungan ekonomi di dalam rumah tangga. Jumlah anggota keluarga yang lebih besar dapat menciptakan interaksi sosial yang lebih kompleks, memerlukan manajemen sumber daya yang lebih efisien, dan sering kali membawa tantangan dalam hal pemenuhan

kebutuhan dasar, seperti ruang tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Sebaliknya, rumah tangga dengan jumlah anggota yang lebih sedikit mungkin menghadapi tantangan berbeda, seperti terbatasnya dukungan internal dalam hal tenaga kerja domestik atau perawatan bagi anggota yang membutuhkan. Selain itu, jumlah anggota keluarga juga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan dan ekonomi keluarga, di mana semakin banyak individu dalam satu rumah tangga, semakin besar kebutuhan yang harus dipenuhi. Data mengenai jumlah anggota keluarga ini penting untuk memahami bagaimana keluarga berfungsi di dalam konteks sosial dan ekonomi, serta untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tabel berikut menyajikan distribusi jumlah anggota keluarga dalam satu rumah, yang memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi demografis dan sosial rumah tangga tersebut.

Tabel 3. Hasil Observasi Tentang Jumlah Anggota Keluarga dalam Satu Rumah

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	3	5	50%
2	4	3	30%
3	1	1	10%
4	2	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 3 menggambarkan bahwa sebagian besar responden (50%) memiliki tiga anggota keluarga dalam satu rumah. Selain itu, 30% responden memiliki empat anggota keluarga, sementara 10% memiliki satu atau dua anggota keluarga dalam satu rumah. Informasi ini mencerminkan variasi dalam struktur keluarga di masyarakat tersebut, yang dapat memengaruhi dinamika dan tuntutan keluarga serta alokasi sumber daya mereka.

Status kepemilikan rumah mencerminkan kondisi hak atas suatu properti

tempat tinggal. Hal ini bisa menjadi gambaran mengenai apakah individu atau keluarga memiliki rumah mereka sendiri, Status Kepemilikan Rumah terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Observasi Tentang Status Kepemilikan Rumah

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Rumah Sendiri	4	40%
2	Rumah Orang Tua	2	20%
3	Kontrak	2	30%
4	Kosan	1	10%
5	Tenda	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 4, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (40%) memiliki rumah sendiri, sementara 20% dari mereka tinggal di rumah orang tua. Selain itu, 30% responden menyewa rumah kontrak, 10% tinggal di kosan, dan 10% lagi tinggal dalam tenda. Data ini menggambarkan keragaman dalam kondisi perumahan di masyarakat tersebut, dengan sebagian besar responden memiliki rumah sendiri, sementara yang lainnya lebih bergantung pada opsi perumahan yang disewa atau didukung oleh keluarga. Hal ini mengindikasikan pentingnya pemahaman mengenai akses perumahan dan kepemilikan rumah dalam merencanakan kebijakan sosial dan perumahan yang sesuai untuk masyarakat ini

Status tanah yang dihuni merupakan aspek penting dalam memahami kondisi sosial dan ekonomi suatu komunitas. Status ini mencerminkan hak-hak individu atau keluarga atas tanah yang mereka tempati, yang bisa berupa kepemilikan pribadi, sewa, kontrak, atau bahkan tanah yang ditempati tanpa kepastian hukum, seperti tanah pemerintah atau lahan tidak bertuan. Status tanah yang dimiliki atau dihuni oleh suatu keluarga dapat memengaruhi banyak hal, mulai dari stabilitas tempat tinggal, akses

terhadap fasilitas dan layanan umum, hingga keamanan jangka panjang bagi penghuni.

Tabel berikut akan menunjukkan berbagai kategori status tanah yang dihuni oleh masyarakat, memberikan gambaran lebih lengkap tentang hak kepemilikan dan akses tanah dalam komunitas tersebut. Hal ini penting untuk analisis lebih lanjut tentang dampak status tanah terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk.

Tabel 5. Hasil Observasi Tentang Status Tanah yang di Huni

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Hak Milik	4	40%
3	Hak Pakai	6	60%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 5, terlihat bahwa mayoritas responden (60%) memiliki hak pakai atas tanah yang mereka huni, sementara 40% lainnya memiliki hak milik atas tanah tersebut. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden tinggal di tanah yang mereka gunakan berdasarkan hak pakai, yang mungkin merujuk pada peraturan atau perjanjian tertentu. Ini adalah informasi yang penting dalam konteks perencanaan perumahan dan properti, serta dapat memberikan wawasan tentang struktur kepemilikan tanah dalam masyarakat tersebut pada tahun 2022. Luas Halaman Pemukiman Kumuh terlihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Observasi Tentang Luas Halaman Pemukiman Kumuh

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Kurang dari 10 m ²	10	100%
2	60 m ² - m ²	0	0
3	10 m ² - 30 m ²	0	0
4	100 m ² m ²	0	0
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 6, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden (100%) memiliki halaman pemukiman kumuh dengan luas kurang dari 10 meter persegi. Tidak ada yang melaporkan memiliki halaman pemukiman dengan luas yang lebih besar seperti 60 meter persegi, 10-30 meter persegi, atau 100 meter persegi. Hasil ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat ini, luas halaman pemukiman kumuh sangat terbatas, yang dapat memengaruhi kualitas dan akses terhadap ruang terbuka serta fasilitas di sekitarnya. Informasi ini berguna dalam upaya perencanaan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman

Tabel berikut memberikan gambaran tentang tingkat kepadatan bangunan di lingkungan pemukiman kumuh, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami masalah tata ruang dan merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif, seperti pengembangan infrastruktur yang lebih baik, pengurangan kepadatan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Tabel 7. Hasil Observasi Tentang Kepadatan Bangunan di lingkungan Pemukiman Kumuh

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Sangat Padat	0	0
2	Padat	10	100%
3	Tidak padat	0	0
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden (100%) menggambarkan bahwa lingkungan pemukiman kumuh yang mereka tinggali dikategorikan sebagai "Padat". Tidak ada yang melaporkan tingkat kepadatan yang lebih rendah atau lebih tinggi seperti "Sangat Padat" atau "Tidak Padat." Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam masyarakat ini, lingkungan pemukiman kumuh cenderung memiliki kepadatan yang tinggi, yang dapat memengaruhi aspek-aspek seperti aksesibilitas, keamanan, dan kualitas hidup di lingkungan tersebut. Informasi ini dapat

berguna dalam perencanaan perumahan dan upaya peningkatan kondisi pemukiman kumuh.

Kepemilikan kamar mandi dan WC adalah faktor penting dalam menilai tingkat kesejahteraan dan sanitasi dalam sebuah rumah tangga. Kepemilikan Kamar Mandi dan Wc terlihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Observasi Tentang Kepemilikan Kamar Mandi dan Wc

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Miliki	7	70%
2	Tidak miliki	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 8 terlihat bahwa sebagian besar responden (70%) menyatakan bahwa mereka memiliki fasilitas kamar mandi dan WC di tempat tinggal mereka. Sementara itu, 30% responden lainnya tidak memiliki fasilitas tersebut. Hasil ini menggambarkan tingkat akses terhadap fasilitas sanitasi di dalam masyarakat tersebut. Kehadiran kamar mandi dan WC yang memadai dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, sementara ketidakhadirannya dapat menunjukkan tantangan yang perlu diatasi dalam hal penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai. Informasi ini penting dalam upaya perbaikan infrastruktur dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Sambungan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai akses penduduk terhadap energi listrik yang stabil dan legal. Akses ke listrik memainkan peran krusial dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal penerangan, penggunaan peralatan elektronik, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Bagi pemukiman yang memiliki sambungan listrik langsung dari PLN, hal ini mencerminkan bahwa mereka memiliki akses yang lebih terjamin terhadap sumber energi yang dapat

diandalkan, serta umumnya mematuhi regulasi yang berlaku terkait penggunaan energi.

Tabel berikut menyajikan data tentang proporsi rumah tangga yang memiliki sambungan listrik dari PLN, yang dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar akses masyarakat terhadap energi listrik yang stabil dan terjangkau di wilayah tersebut. Data ini penting untuk memahami kebutuhan infrastruktur listrik di kawasan pemukiman dan dapat menjadi dasar perencanaan perbaikan akses listrik di masa mendatang.

Tabel 9. Hasil Observasi Tentang Sambungan Listrik dari PLN

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Sudah, melalui sambungan sendiri	9	90%
2	Sudah, melalui sambungan dari tetangga	1	10%
3	Belum	0	0
4	Memakai lilin	0	0
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 9, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden (90%) telah memiliki sambungan listrik dari PLN, dan mereka telah memasangnya sendiri. Hanya satu responden (10%) yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki sambungan listrik dari tetangga. Tidak ada yang melaporkan bahwa mereka belum memiliki sambungan listrik atau menggunakan lilin sebagai sumber pencahayaan. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dalam masyarakat ini telah memiliki akses ke listrik yang dihasilkan oleh PLN, yang penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup mereka.

Sumber air bersih adalah elemen esensial dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup pasokan air yang aman dan layak untuk kebutuhan konsumsi dan penggunaan

domestik. Sumber Air Bersih terlihat pada tabel berikut

Tabel 10. Hasil Observasi Tentang Sumber Air Bersih

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	PDAM	2	20%
2	Sumur Pompa	5	500%
3	Sumur umum	2	20%
4	Membeli dari tetangga	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 10 terlihat bahwa variasi dalam sumber air bersih yang digunakan oleh responden. Sebagian besar responden (50%) mengandalkan sumur pompa sebagai sumber air bersih utama mereka, sementara 20% lainnya menggunakan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan 20% mengandalkan sumur umum. Hanya 10% responden yang membeli air dari tetangga.

Kondisi jalan di lingkungan pemukiman adalah aspek kritis dalam infrastruktur perkotaan yang memengaruhi mobilitas, kenyamanan, dan keamanan penghuni setempat. Kondisi Jalan di Lingkungan Pemukiman terlihat pada tabel berikut

Tabel 11. Hasil Observasi Tentang Kondisi Jalan di Lingkungan Pemukiman

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Aspal	0	0
2	Tanah	10	10%
3	Baton	0	0
4	Paving	0	0
5	Pelantar/jembatan	0	0
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 11, terlihat bahwa seluruh responden (100%) melaporkan bahwa kondisi jalan di lingkungan pemukiman mereka terdiri

dari tanah. Tidak ada yang melaporkan adanya jalan aspal, baton, paving, atau pelantar/jembatan dalam lingkungan pemukiman mereka. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam masyarakat ini, infrastruktur jalan di pemukiman kumuh masih dalam kondisi primitif dengan menggunakan tanah sebagai material dasar jalan. Kondisi ini dapat memengaruhi aksesibilitas, mobilitas, dan kenyamanan penduduk dalam lingkungan tersebut, serta menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk perbaikan infrastruktur dasar. Informasi ini penting dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di pemukiman kumuh.

Tempat pembuangan sampah adalah elemen penting dalam manajemen limbah yang mencerminkan bagaimana suatu komunitas mengelola sampah domestik. Tempat Pembuangan Sampah terlihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Hasil Observasi Tentang Tempat Pembuangan Sampah

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Miliki	8	80%
2	Tidak memiliki/di pantai	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 12, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden (80%) memiliki tempat pembuangan sampah sendiri. Namun, 20% responden lainnya mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki tempat pembuangan sampah atau sampah mereka dibuang di pantai. Hasil ini menggambarkan variasi dalam praktik pembuangan sampah di masyarakat tersebut, dengan mayoritas yang memiliki tempat pembuangan sendiri, sementara sebagian kecil menghadapi masalah pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan praktik yang berkelanjutan. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk upaya

peningkatan pengelolaan sampah yang lebih baik di dalam masyarakat tersebut, yang melibatkan penyediaan fasilitas yang memadai serta kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Struktur kelembagaan perangkat desa adalah organisasi yang terdiri dari berbagai jabatan dan entitas di tingkat desa, yang bertugas mengelola dan mengatur berbagai aspek pembangunan, pelayanan publik, serta administrasi di tingkat lokal. Struktur Kelembagaan Perangkat Desa terlihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Hasil Observasi Tentang Struktur Kelembagaan Perangkat Desa

No.	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Berjalan dengan baik	10	100%
2	Tidak punya struktur	0	0
3	Belum ada struktur	0	0
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Tabel 13 dapat dilihat bahwa seluruh responden (100%) melaporkan bahwa struktur organisasi atau tata kelola di dalam entitas atau organisasi yang mereka tinjau berjalan dengan baik. Tidak ada yang melaporkan bahwa mereka tidak memiliki struktur organisasi, atau bahwa struktur organisasi belum ada. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam konteks yang diamati, entitas atau organisasi memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan efisien, yang dapat mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan mereka. Informasi ini dapat memberikan gambaran positif tentang manajemen dan tata kelola di dalam organisasi tersebut.

Penataan kawasan di lingkungan pemukiman adalah upaya untuk merancang, mengatur, dan mengelola ruang fisik suatu wilayah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih teratur, nyaman, dan

berkelanjutan Penataan kawasan di lingkungan pemukiman terlihat pada tabel berikut

Tabel 14 terlihat bahwa seluruh responden (100%) mengindikasikan bahwa penataan kawasan di lingkungan pemukiman mereka diatur oleh RT/RW dengan menggunakan batu merah. Tidak ada yang melaporkan bahwa penataan kawasan dilakukan oleh organisasi masyarakat atau bahwa tidak ada pengaturan sama sekali. Hasil ini menggambarkan bahwa dalam lingkungan pemukiman yang diamati, penataan dan pengaturan kawasan dikelola oleh RT/RW dengan menggunakan batu merah sebagai alat penanda atau pembatas. Informasi ini dapat mengindikasikan sistem tata kelola lokal yang berfungsi dengan baik di dalam lingkungan pemukiman tersebut.

Tabel 14. Hasil Observasi Tentang Penataan Kawasan di Lingkungan Pemukiman

No	Jawaban responden	Jumlah	%
1	Di atur oleh organisasi masyarakat	0	0
2	Tidak ada pengaturannya	0	0
3	Di atur oleh RT/RW batu merah	10	10%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data dari Kuesioner 2022.

Pembahasan

Pengembangan kota Ambon sebagai sebuah kota yang memiliki populasi yang sangat padat, terutama di pusat kota dan sekitarnya, menjadi sebuah fokus penting dalam penelitian ini. Salah satu daerah yang menjadi objek penelitian, yaitu Desa Batu Mera di Kecamatan Sirimau, menunjukkan karakteristik yang dapat dikategorikan sebagai daerah kumuh. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap status kumuhnya daerah ini telah dijelaskan dalam awal pembahasan, di mana urbanisasi yang

meningkat, terutama dari pendatang, merupakan salah satu penyebabnya.

Hasil penelitian di Desa Batu Mera Kecamatan Sirimau mengungkapkan bahwa banyak pendatang yang membangun secara bebas di wilayah tersebut tanpa izin resmi dari pemerintah. Mereka datang ke desa ini setelah tempat tinggal mereka sebelumnya mengalami kebakaran, dan perpindahan ini dilakukan dengan tujuan mencari tempat yang lebih aman. Wilayah tersebut juga memiliki banyak bangunan yang tidak dimanfaatkan, termasuk rumah-rumah yang dikontrak tetapi dibiarkan kosong, serta beberapa bangunan yang dibangun sebagai kos-kosan atau ruko namun tidak ditempati. Kondisi ini mencerminkan penggunaan lahan yang tidak efisien dan dampak urbanisasi yang berlebihan di daerah tersebut.

Kondisi sosial ekonomi di Desa Batu Mera Kecamatan Sirimau juga mencerminkan ketidaklayakan tempat tersebut untuk ditempati. Banyak kepala rumah tangga yang tinggal dalam kondisi yang tidak layak, seperti di kontrakan, kos-kosan, atau bahkan di tenda pengungsian akibat kebakaran. Keadaan ini menunjukkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap perumahan yang layak di masyarakat tersebut, dan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur perumahan dan dukungan sosial bagi warga yang kurang mampu.

Pembangunan yang tidak terkontrol di wilayah ini juga menjadi masalah, terutama karena alasan pajak yang tidak dikenakan pada pembangunan di beberapa lokasi. Beberapa pendatang memanfaatkan peluang ini untuk melakukan pembangunan tanpa izin pemerintah, yang mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi dan berdampak pada infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas umum. Ini menunjukkan perlunya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pembangunan di wilayah tersebut.

Dalam hal perekonomian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan setiap keluarga di Desa Batu Mera masih

belum mencukupi kebutuhan dasar. Meskipun demikian, banyak dari mereka mencoba untuk mencari cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, termasuk dengan membuka usaha kecil. Ini mencerminkan daya ketahanan dan semangat berusaha dari penduduk setempat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan ini, pengembangan kota Ambon harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk peningkatan infrastruktur perumahan yang layak, pengaturan pembangunan yang lebih efisien, serta program sosial dan ekonomi untuk mendukung penduduk, terutama mereka yang kurang mampu. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah yang kompleks ini dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di daerah tersebut. Untuk kondisi wilayah di desa batu merah peneliti bisa mengatakan bahwa masih terlihat kurang layak untuk dihuni, hal ini bisa dilihat dari masih adanya masyarakat yang tinggal ditenda pengungsian. Lokasi wilayah tempat tinggal juga sangat padat atau saling berdempetan, untuk air bersih banyak yang menggunakan sumur bora ada juga yang membeli air dari tetangga dan nada juga yang mengambil air di sumur umum. Lokasi tersebut juga karena sangat padat dan rapat maka untuk pembuangan sampah mereka justru membuangnya di pantai da nada juga yang membuangnya di TPU atau tempat sampah Umum namun TPU sendiri juga berada jauh dari pemukiman mengakibatkan masyarakat lebih memilih alternative yang lebih muda dengan membuang sampah di pantai atau di bakar di samping pantai.

KESIMPULAN

Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat yang diamati menghadapi sejumlah tantangan sosial dan ekonomi. Mayoritas kepala keluarga memiliki pendapatan bulanan rendah, yang

mencerminkan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan. Meskipun sebagian besar responden menyatakan bahwa pendapatan mereka mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada 20% yang masih menghadapi kesulitan dalam hal ini. Selain itu, kondisi perumahan dan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian penting. Meskipun sebagian besar memiliki rumah sendiri, kondisi jalan yang primitif dan ketersediaan fasilitas sanitasi yang terbatas mencerminkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur. Terlebih lagi, kondisi lingkungan pemukiman kumuh yang padat juga menjadi perhatian yang harus diatasi.

Selain itu, masyarakat ini memiliki keragaman dalam struktur keluarga, kepemilikan rumah, dan sumber air bersih. Hal ini menunjukkan pentingnya merancang kebijakan yang memperhitungkan variasi ini dan memastikan bahwa layanan dasar seperti sanitasi, listrik, dan air bersih tersedia bagi semua penduduk. Informasi ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih baik dalam hal pembangunan ekonomi, perumahan, dan infrastruktur, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat ini secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliannisa, D. (2009). *Permukiman Kumuh Di Kota Bandung*.
- Juwono, P. T., Subagiyo, A., & Winarta, B. (2022). *Neraca Sumber Daya Air dan Ruang Kota Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Karina, R., Taqwim, M. A., Hikari, H. N., & Abrari, F. (2014). Perubahan Penggunaan Lahan Sawah menjadi Pemukiman di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Tahun 2019-2022. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2(1), 170-177. <https://doi.org/https://doi.org/10.56211/blendsains.v2i1.272>
- Kiswoyo, G. P., Nurcahyanto, H., & ... (2023).

- Proses Collaborative Governance Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota, *Policy and Management* 12(2), 9-19.
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.37955>
- Kusumawardhana, I. (2023). Diplomasi Triangular China Terhadap Indonesia Dalam Mengantisipasi Dilema Malaka Melalui Belt Road Initiative. *The Journalish: Social and Government*, 4(2), 173-189.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.485>
- Lasaiba, M. A., E.E.H.Woersok, & Louhenapessy, S. W. J. (2010). *Tendensi Spasial dan Faktor-Faktor Penyebab Tingkat Kekotaan di Kota Ambon* (Issue January 2010).
<https://www.researchgate.net/publication/367326377>
- Leuwol, F. S., Salampessy, M., & Dewi, W. A. (2023). Analysis of the Application of WFH Policies in Overcoming Pollution Problems in Jakarta. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(3), 1400-1404.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jr.v6i3.33939>
- Muryanti, M. A. (2022). *Masyarakat Transisi: Meleburnya Batas-Batas Desa Kota*. Bursa Ilmu Yogyakarta.
- Permatasar, N. D., Lestari, F., Karenina, A., & Nasution, A. P. (2022). Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kampung dari semi kumuh menjadi kampung kreatif (studi kasus: Kampung Bekelir, Kelurahan Babakan, Kota Tangerang). *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 346.
<https://doi.org/10.20961/region.v17i2.54876>
- Prasetyo, A. (2009). Karakteristik Permukiman Kumuh di Kampung Krajan Kelurahan Mojosoongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-20.
- Putra, I. M., Dakwah, F., Universitas, K., Negeri, I., & Utara, S. (2023). Jurnal Darma Agung Ekonomi Masyarakat Desa Klumpang Kebun , Kecamatan. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 178-197.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3418>
- Putra, S. M., Latief, R., & Suaeb, I. (2022). Pengaruh Perubahan Morfologi Kota Terhadap Pembentukan Struktur Ruang Kota Kupang. *Urban and Regional Studies Journal*, 4(2), 102-109.
<https://doi.org/10.35965/ursj.v4i2.1465>
- Surya, I. B., & Taibe, P. (2022). *Transormasi Spasial dan Perubahan Sosial Komunitas Lokal: Perspektif Dinamika Pembangunan Kawasan Kota Baru*. Chakti Pustaka Indonesia.
- Wagistina, S., Suman, A., & Yanuwidi, B. (2023). *Perambahan Kota: Konsep dan Model Pembangunan Wilayah Sub-urban*. Empatdua Media.